



BAB II KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai konsep-konsep yang menjadi landasan penelitian. Konsep yang akan dibahas yaitu landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

A Landasan Teori

Penerapan GCG diyakini mampu mengurangi adanya tindak penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh manajer yang bisa berdampak negatif bagi pihak prinsipal. Dengan begitu penelitian ini mengacu pada teori agensi, dimana teori ini menjelaskan jika terdapat perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan juga pemegang saham sebagai bagian dari prinsipal perusahaan.

1. Teori Agensi

Dalam memahami Good Corporate Governance, teori dasar yang digunakan adalah teori agensi. Dimana dalam suatu perusahaan pastinya akan memiliki hubungan kontraktual sebagai hubungan keagenan yang terjadi di antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan untuk mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional atau agensi karena tenaga profesional akan lebih memahami proses menjalankan bisnis sehari-hari. Pada teori ini, diberikan pengetahuan analisa supaya mampu mengkaji dampak atas hubungan agen dengan principal atau principal dengan prinsipal. Menurut Tandiontong (2015:5). Pemisahan pengelolaan dari kepemilikan usaha memiliki tujuan supaya pemilik usaha mampu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mungkin sebagai hasil pengelolaan perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional yang dimiliki.

Dinyatakan dalam penelitian Ujiyantho & Pramuka (2007) jika hubungan keagenan muncul apabila satu atau lebih principal mempekerjakan agen (tenaga profesional) dengan tujuan memberikan suatu jasa, lalu mendelegasikan wewenang keputusan kepada agen tersebut. Dengan adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, membuat seorang agen wajib bertanggung jawab atas mandat yang diterimanya. Menurut Christiawan & Tarigan (2007), hubungan prinsipal dan agen dalam perusahaan diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan akan berinteraksi dengan berbagai pihak seperti direksi, pemegang saham, pemerintah, karyawan, kreditor dan masyarakat. Hubungan principal-agen tidak terbatas pada hubungan pemegang saham dan manajer namun juga dalam perihal laporan keuangan dalam hubungan investor dan manajemen sebagai hubungan keagenan, termasuk hubungan manajemen perusahaan dengan auditor independen disebut hubungan keagenan (M. C. Jensen & Meckling, 1976)

Sebagai pihak pengelola perusahaan, agen memiliki banyak informasi dibanding principal. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan distribusi informasi yang seimbang bagi prinsipel dan agen yang bisa disebut dengan asimetris informasi. Apabila tidak terjadi pengawasan yang ketat, Tindakan agen bisa tidak teramati dengan baik sehingga agen cenderung mengejar kepentingannya sendiri yang dapat bertentangan dan merugikan kepentingan prinsipal

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Adanya konflik perbedaan kepentingan baik dari pihak principal dan agen dapat mempengaruhi penyelesaian laporan keuangan yang memicu *audit report lag*. Dengan adanya komite audit, konflik kedua belah pihak akan dapat ditengahi karena komite audit objektif didirikan perusahaan supaya penyajian laporan keuangan bisa tersaji sebaik mungkin.

Oleh karena itu, digunakan teori keagenan guna membantu komite audit memahami apa yang menjadi konflik kepentingan antara principal dan agen. Pemilik sebagai pihak investor yang menyepakati kontrak kerja dengan manajemen perusahaan dalam menginvestasikan dana. Diharapkan dengan adanya komite audit, maka kecurangan dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan tidak akan menimbulkan *audit lag report*. Sekaligus mampu memeriksa kembali kinerja manajemen hingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik bagi investor untuk mengambil keputusan.

Teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi menurut Eisenhardt (1989:59), yaitu :

a. Asumsi mengenai sifat manusia

Asumsi ini menekankan jika manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri, keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.

b. Asumsi mengenai keorganisasian

Asumsi keorganisasian merupakan adanya konflik yang terjadi antar anggota organisasi, penilaian efektivitas sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri information antara principal dan agen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Asumsi mengenai informasi

Asumsi mengenai informasi merupakan asumsi yang memandang bahwa informasi merupakan barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

2. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Selain memperbesar adanya laba, penting juga bagi perusahaan memperbesar profitabilitasnya. Dalam hal tersebut, rasio profitabilitas dapat digunakan perusahaan guna melihat sejauh mana kemampuan manajemen yang dijalankan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara maksimal. Selain itu, efisiensi juga tidak bisa diukur berdasarkan laba yang besar. Tetapi baru bisa dilihat dengan melakukan perbandingan laba bersih terhadap aktiva tersebut.

Profitabilitas merupakan kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan (Husnan & Pujiastuti, 2012). Selain itu, profitabilitas juga mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang akan dilakukannya sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas akan menarik investor untuk menanamkan modal guna memperluas usahanya. Namun sebaliknya jika tingkat profitabilitas semakin rendah hal itu akan menyebabkan para investor memilih menarik dananya. Berbeda bagi perusahaan, profitabilitas bisa digunakan menjadi evaluasi untuk melihat seberapa efektifnya pengelolaan organisasi tersebut.

Profitabilitas menjadi salah satu dasar dalam penilaian kondisi suatu perusahaan, maka itu analisis dibutuhkan untuk dapat menilainya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan begitu setiap perusahaan akan dapat meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin terjamin juga keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

b. Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2015) manfaat rasio profitabilitas tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen usaha, namun rasio profitabilitas juga bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, terutama bagi pihak-pihak yang secara langsung berhubungan atau berkepentingan dengan perusahaan.

Adapun tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:197) adalah:

- 1) Melakukan perhitungan dan pengukuran terhadap laba yang telah diperoleh perusahaan dalam suatu periode
- 2) Untuk mengukur efektivitas dana perusahaan yang telah terpakai baik modal sendiri maupun modal pinjaman
- 3) Untuk melihat dan membandingkan posisi laba perusahaan periode sebelum dengan periode sekarang.
- 4) Untuk menilai sejauh mana perkembangan laba perusahaan dari tahun ke tahun.
- 5) Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan bersih perusahaan setelah pajak dengan modal sendiri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selanjutnya, Manfaat yang didapat atas rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2015:197), yaitu:

- 1) Mengetahui besaran tingkat perolehan laba perusahaan dalam suatu periode
- 2) Memahami posisi laba perusahaan tahun sebelum dan tahun sekarang
- 3) Memantau perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Memahami besaran laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui seberapa efektif penggunaan dana perusahaan baik dengan modal pinjaman maupun modal sendiri.

c. Jenis – Jenis Profitabilitas

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Tiap jenis rasio profitabilitas akan menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Maka dari itu, penggunaan rasio profitabilitas atau sebagian kembali lagi kepada kebijakan manajemen. Semakin lengkap penggunaan jenis rasio yang digunakan, maka hasil yang dicapai akan semakin sempurna dikarenakan perusahaan mampu memiliki pengetahuan luas mengenai kondisi dan posisi profitabilitas perusahaan. Berikut jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198-208):

1) *Profit Margin on Sales / Profit Margin*

Merupakan rasio profitabilitas yang pengukurannya membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penjualan bersih. Dalam mencari profit margin terdapat 2 rumus, yaitu :

a) Untuk margin laba kotor

Margin laba kotor merupakan cara guna menetapkan HPP karena menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan mengurangi penjualan bersih dengan HPP.

Profit Margin =

$$\frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

b) Untuk margin laba bersih

Margin laba bersih menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan dikarenakan rasio ini merupakan ukuran keuntungan dengan melakukan perbandingan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan

Profit Margin =

$$\frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

2) *Return on Investment (ROI)* / Hasil Pengembalian Investasi

Merupakan suatu ukuran guna melihat seberapa efektif manajemen perusahaan mengelola investasinya baik dana perusahaan modal pinjaman maupun modal sendiri. Rasio ini menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

digunakan oleh perusahaan. Apabila hasil rasio yang diperoleh rendah (kecil) maka akan semakin kurang baik dan sebaliknya.

$$ROI = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Total Assets}}$$

3) *Return on Equity (ROE) / Hasil Pengembalian Ekuitas*

Merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. ROE menggambarkan seberapa efektif penggunaan modal sendiri. Apabila rasionya semakin tinggi, maka semakin baik karena menggambarkan jika pemilik perusahaan memiliki posisi yang semakin kuat, demikian sebaliknya.

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Equity}}$$

4) *Laba per Lembar Saham (Earning per Share of Common Stock)*

Bisa disebut rasio nilai buku digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen untuk memperoleh keuntungan untuk para pemegang saham. Apabila rasio yang didapatkan tinggi maka manajemen berhasil untuk memuaskan dan menyejahterakan pemegang saham.

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE). Peneliti menganggap ROE paling tepat di antara rasio profitabilitas lainnya dalam hubungannya dengan return saham karena merupakan rasio yang mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri yang pada bagian akun modal terdapat modal pemegang saham.

d. Pengertian Return on Equity

ROE merupakan rasio yang membandingkan antara laba bersih suatu emiten dengan modal sendiri yang dimilikinya (Harahap, 2008:156). Apabila perusahaan memiliki ROE yang tinggi, itu mencerminkan jika perusahaan mampu mencapai keuntungan dari modalnya sendiri. Seiring meningkatnya ROE hal itu akan diiringi juga dengan peningkatan nilai jual perusahaan yang berdampak pada harga saham, sehingga hal ini akan berkorelasi dengan peningkatan profitabilitas.

Return on Equity disebut juga sebagai laba atas ekuitas atau perputaran total aset (Fahmi, 2015:85) merupakan perhitungan yang sangat penting bagi perusahaan karena mengkaji penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memberikan laba atas ekuitas. Rasio ROE yang tinggi dan konsisten pada perusahaan menunjukkan jika perusahaan memiliki keunggulan yang bersaing dalam perusahaan sejenisnya. Efektivitas pengelolaan ekuitas yang diberikan oleh para pemodal dan pengelolaan operasional oleh pihak manajemen diukur dengan *Return on Equity* (ROE), yang mana semakin tinggi nilai ROE maka perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modal untuk menghasilkan keuntungan. Dengan adanya peningkatan laba, maka harga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham akan semakin meningkat diikuti dengan profitabilitas yang didapat perusahaan.

Rasio ROE digunakan sebagai dasar seorang calon investor dan investor dalam menanamkan modal pada perusahaan dikarenakan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal sendiri yang dimiliki.

3. Good Corporate Governance

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) atau bisa disebut tata kelola perusahaan saat ini semakin populer. Selain itu, istilah ini juga ditempatkan sebagai posisi terhormat karena GCG menjadi salah satu kunci perusahaan untuk tumbuh meraih kesuksesan, memenangkan persaingan bisnis dan juga meraih keuntungan jangka panjang.

Menurut (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001*), GCG didefinisikan sebagai suatu aturan dan sistem perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan dan eksternal lainnya yang terhubung dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki, atau bisa disebut sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut KNKG (2006), GCG merupakan suatu sistem yang diperlukan guna memotivasi terciptanya pasar yang efisien, transparan juga konsisten dengan peraturan perundang - undangan. Selain itu secara singkat dijelaskan jika GCG merupakan sebagian strategi guna meningkatkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001).

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, bisa disimpulkan bila *Good Corporate Governance* adalah suatu aturan yang didalamnya terdapat strategi guna mengatur hubungan kepentingan baik pemegang saham dengan manajemen yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan dan bertujuan guna meningkatkan keberhasilan usaha supaya menciptakan kondisi yang efisien, transparan, dan konsisten dengan undang-undang.

a. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Menurut Sutojo & Aldrige (2005:5) terdapat lima macam tujuan utama dari *Good Corporate Governance* yaitu :

- 1) Melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*.
- 2) Melindungi hak dan kepentingan bagi para anggota *stakeholder* non-pemegang saham.
- 3) Mengembangkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4) Mengembangkan tingkat efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus dan manajemen perusahaan.
- 5) Mengembangkan kualitas hubungan Dewan Pengurus dengan manajemen perusahaan.

Selanjutnya, manfaat *Good Corporate Governance* menurut Sutojo & Aldrige (2005:7-9), yaitu :

- 1) Mencegah adanya pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan kepada pemegang saham, investor, dan pihak yang berkepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Membantu *Board of Directors* untuk menjalankan pembimbingan bagi manajemen perusahaan secara lebih efektif.
- 3) Membantu *Board of Directors* melakukan pengarahan dan pengendalian untuk kegiatan bisnis perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemiliknya.

b. Kriteria pada Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam Sutojo & Aldrige (2005), menurut OECD terdapat 5 kriteria dalam penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu:

1) Hak Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki hak seperti menjual kembali atau memindahtangankan saham yang dimiliki, menerima deviden dan ikut menghadiri rapat umum pemegang saham yang diadakan. Tentunya hak tersebut harus dilindungi perusahaan secara hukum.

2) Perlakuan Adil Terhadap para Pemegang Saham

Para pemegang saham baik saham preferen maupun saham biasa wajib mendapat jaminan dalam memperoleh perlakuan yang sama. Hal ini berkaitan dengan informasi mengenai saham yang diperdagangkan dalam bursa efek sebelum investor membeli saham.

3) Peranan *stakeholders*

Adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggota stakeholder non-pemegang saham. Hal ini disarankan oleh OECD karena operasional bisnis perusahaan yang berhasil terjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena adanya hasil kerja sama para anggota *stakeholders* dimana didalamnya termasuk pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan juga para pemasok layanan jasa, bahan baku dan bahan pembantu.

4) Pengungkapan Informasi secara Transparan

Seperti yang terdapat pada asas *Good Corporate Governance*, OECD mewajibkan bagi para *Board of Directors* untuk wajib melaporkan hal-hal terkait kondisi keuangan, adanya perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-hal penting lainnya kepada para pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu.

5) Tanggung Jawab Dewan Pengurus

Board of Directors atau Organisasi Dewan Pengurus di berbagai negara terdiri atas dua lapis salah satunya di Indonesia. Pada lapis pertama terdapat Dewan Komisaris yang berfungsi dalam pengarahan dan pengawasan pada jalannya kegiatan operasional bisnis perusahaan dan kinerja Direksi. Pada lapis kedua terdapat Direksi, yang berfungsi dalam mengelola harta, utang serta kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. *Board of Director* tentunya bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan yang dikelolanya, mereka bertanggung jawab kepada undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang mengenai perpajakan, perburuhan, persaingan, lingkungan hidup, perkreditan dan keselamatan kerja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Faktor-faktor yang menjadi Pengaruh pada Penerapan *Good Corporate Governance*

Dalam penerapan GCG, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya (Kalihatu, 2006), yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor pendorong keberhasilan yang ada di dalam perusahaan, yaitu:

- a) Adanya *corporate culture* dimana budaya tersebut mendukung adanya penerapan tata kelola perusahaan dalam mekanisme perusahaan.
- b) Adanya kebijakan dan peraturan perusahaan yang mengacu pada nilai-nilai tata kelola perusahaan.
- c) Terdapat manajemen pengendalian risiko yang berdasarkan pada standar tata kelola perusahaan.
- d) Terlaksananya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif sebagai upaya perusahaan menghindari kemungkinan adanya penyimpangan.
- e) Terdapat keterbukaan informasi dalam setiap gerak dan langkah manajemen supaya publik mampu memahami perusahaan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Adanya jaminan sistem hukum yang baik guna menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Perusahaan mendapat dukungan dari sektor publik/ lembaga pemerintahan mengenai pelaksanaan GCG.
- c) Terdapat acuan atau standarisasi yang efektif dan profesional bagi penerapan GCG.

4. Struktur Organ Perusahaan dalam *Good Corporate Governance*

Organ perusahaan merupakan bentuk atas struktur *Governance* yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Indonesia menganut sistem dua badan (*Two board System*), dimana fungsi direksi dan dewan komisaris masing-masing punya fungsi independennya yang akhirnya menciptakan *check and balance*. Selain itu terdapat *fiduciary responsibility* yang mengamankan fungsi direksi dan dewan komisaris dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2014)

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut KNKG (2014), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang berfungsi sebagai wadah bagi pemegang saham untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan berkaitan dengan investasi yang ditanamkan dalam sebuah perusahaan. Selain itu, tanpa mengurangi wewenang RUPS atau pemegang saham, RUPS mampu melakukan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris atau Direksi namun tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Sesuai dengan fungsi yang telah diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).

1) Pengertian Dewan Komisaris dan Direksi

Berikut ini penjelasan mengenai Dewan Komisaris dan Direksi :

a) Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2014), pengawasan atas kebijakan pengurusan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk memperdalam hal-hal yang nantinya akan diputuskan Dewan Komisaris secara bersama-sama. Selain itu tugas komisaris utama adalah *Primus in ter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris karena kedudukan masing-masing setiap anggota komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Ukuran Dewan Komisaris =

Jumlah Anggota Dewan Komisaris

b) Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Kedudukan setiap anggota



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (KNKG, 2014):

- 1) Komposisi Direksi harus memungkinkan untuk pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Direksi harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya
- 3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

Ukuran Direksi = Jumlah Anggota Direksi

2) Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Menurut Zarkasyi (2008), dalam menjaga keberlangsungan perusahaan berikut tanggung jawab bersama yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi:

- a) Kontrol internal dan manajemen risiko terlaksana dengan baik.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) Pemegang saham mendapatkan hasil yang optimal sebagai dampak tercapainya imbal hasil.
- c) Pemangku kepentingan secara wajar terlindungi kepentingannya.
- d) Tercapainya kesinambungan manajemen di semua lini organisasi sebagai hasil terlaksananya kepemimpinan yang wajar

c. Komite Audit

Komite Audit diciptakan untuk bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus dan para Direktur secara individual dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bantuan Komite Audit sangat diperlukan bagi pengendalian internal, kebijakan akunting, pengelolaan manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kepatuhan pada anggaran dasar, serta anggaran rumah tangga perusahaan disertai pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan akurat.

Menurut Sutojo & Aldrige (2005:129), Komite Audit komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas transparansi pengungkapan laporan perusahaan.
- 2) Mengawasi ruang lingkup, akurasi, efektivitas pembiayaan serta independensi auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Mempersiapkan adanya surat penetapan tugas dan tanggung jawab komite audit selama setahun bagi yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Pada laporan tahunan perusahaan, surat penugasan komite audit tadi akan dimuat

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

5. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah bentuk keterkaitan antara pemegang saham dan manajer dalam mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada manajer. Digunakan struktur kepemilikan guna menunjukkan jika variabel-variabel yang penting dalam Good Corporate Governance tidak hanya ditunjukkan oleh organ perusahaan saja, namun juga ditentukan dari seberapa besar persentase kepemilikan saham oleh manajemen dan institusi.

Menurut Sugiarto (2009), struktur kepemilikan merupakan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki orang dalam dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dalam kepemilikan saham perusahaan.

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, dimana secara aktif pihak manajemen ikut mengambil keputusan di dalam perusahaan seperti direktur dan komisaris. Adanya kepemilikan saham oleh manajemen akan mendorong manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan. Hal itu dikarenakan, manajemen akan mengeluarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

keputusan pendanaan atau kebijakan yang akan mempengaruhi perusahaan dalam mencapai laba yang tinggi dan mengembangkan perusahaan tersebut.

Adanya kepemilikan manajerial membuat manajemen akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dikarenakan secara tidak langsung manajer akan merasakan manfaat dan kerugian atas keputusan yang diambilnya. Adanya kepemilikan manajerial juga akan menyejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham lainnya, sehingga tindakannya dapat selaras dengan pemegang saham lainnya.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jmlh saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi lain (Sukirni, 2012). Kepemilikan institusional akan mendorong adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Adanya pengawasan yang efektif akan berdampak bagi para investor dan calon investor dalam mempercayai perusahaan untuk nantinya menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jmlh saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini.

Berikut penelitian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015
Nama Peneliti	Melanthon Rumapea
Tahun	2017
Variabel	Variabel Dependen : Profitabilitas perusahaan. Variabel Independen : Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen Dewan Direksi (DD), Dewan Komisaris (DK), dan Komite Audit (KA) terhadap <i>Return on Equity</i> (ROE) memiliki pengaruh simultan yang positif dan signifikan. 2. Secara parsial Dewan Komisaris (DK) berpengaruh positif dan signifikan. 3. Secara parsial dewan direksi (DD) dan komite audit (KA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity (ROE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015
Nama Peneliti	Luh Putu Ari Anjani dan I Putu Yadnya
Tahun	2017
Variabel	Variabel dependen : Profitabilitas (ROE) Variabel independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit.
Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Kepemilikan Institusional (KI), Dewan Komisaris (DK) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.2. Dewan Direksi (DD) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.3. Komite Audit (KA) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan
Nama Peneliti	Nungky Wanodyatama Islami
Tahun	2018
Variabel	Variabel Dependen : Profitabilitas (ROE) Variabel Independen : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Anggota Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris, Komite Audit
Hasil	1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perusahaan. 2. Proporsi Anggota Independen Dewan Komisaris Berpengaruh Positif terhadap Profitabilitas perusahaan. 3. Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perusahaan. 4. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017)
Nama Peneliti	Raina Betaria Sere Sinambela
Tahun	2019
Variabel	Variabel Dependen : Profitabilitas (ROI) Variabel Independen : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris
Hasil	1. Secara parsial Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROI 2. Secara parsial Kepemilikan Institusional (KI) berpengaruh negatif signifikan terhadap ROI. 3. Ukuran Dewan Komisaris (DK) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROI. 4. Ukuran Komite Audit (KA) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROI. 5. Variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROI..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan di BEI Tahun 2017-2019
Nama Peneliti	Yuniar Fitriani
Tahun	2021
Variabel	Variabel Dependen : Profitabilitas (ROE) Variabel Independen : Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit
Hasil	1. Jumlah Dewan Komisaris (DK) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. 2. Jumlah Komite Audit (KA) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. 3. Jumlah Direksi secara parsial berpengaruh positif Return on Equity (ROE) 4. Komisaris(DK), Direksi(DD) serta Komite Audit(KA) secara simultan/ bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap ROE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dalam penelitian ini, adanya pengaruh dari *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI menjadi Kerangka Konseptual. Dijelaskan juga oleh (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001), bahwa terminologi atas *Corporate Governance* bisa dipakai sebagai sarana untuk menjelaskan peranan dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pengurus Perusahaan, dan juga bagi Pemegang Saham.

1. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Profitabilitas

Teori keagenan (M. Jensen & Meckling, 1998) menjelaskan bahwa pada dasarnya manajemen selaku pihak agen yang dipercaya oleh pemilik saham atau principal untuk mengelola perusahaan guna mencapai tujuan yaitu menyejahterakan prinsipal. Namun, agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal dimana agen cenderung melakukan tindakan oportunistis yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan dan akan menimbulkan konflik atau masalah keagenan. Peningkatan kepemilikan manajerial dinilai sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi masalah keagenan. Manajemen akan berperan sebagai agen dan juga sebagai prinsipal sehingga akan memiliki tujuan yang sama. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena manajemen akan menerima konsekuensi dari pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, tingginya kepemilikan manajerial akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan Sinambela (2019), Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif namun signifikan terhadap profitabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Profitabilitas

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mampu meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan yang bisa berdampak pada peningkatan profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan Anjani & Yadnya (2017), variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif namun signifikan terhadap profitabilitas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela (2019) dimana Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif namun signifikan terhadap profitabilitas.

3. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Profitabilitas

Komisaris memegang pengendalian internal yang teratas dan bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mengawasi dan pemberian masukan pada direksi bahwa GCG telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki minimal 2 anggota dewan direksi bila perusahaan berbentuk perseroan terbatas UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar kinerja dewan komisaris benar-benar dapat dimaksimalkan dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak manajemen. Pengukuran dewan komisaris dalam riset ini dihitung

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berdasarkan total anggota dewan komisaris dalam satu tahun pada suatu perusahaan (Sinaga, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumapea (2017), pada variabel Dewan Komisaris secara parsial berpengaruh positif namun signifikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Islami (2018) dimana Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun pada penelitian yang dilakukan Sinambela (2019), meskipun Dewan Komisaris berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Hubungan Ukuran Komite Audit dengan Profitabilitas

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Winata, 2014).

Pada 2017, hasil penelitian Rumapea (2017) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015” menyatakan adanya pengaruh negatif namun signifikan pada variabel Komite Audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Islami (2018) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan” dimana Komite Audit berpengaruh negatif dan penelitian yang dilakukan Sinambela (2019) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa

4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

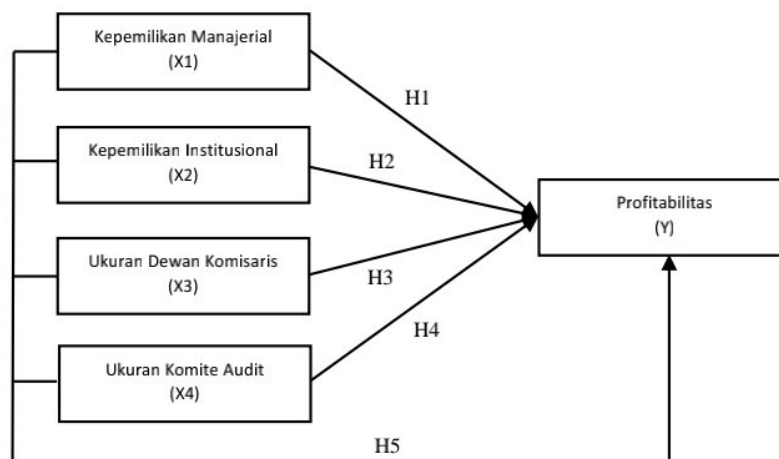
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Efek Indonesia Tahun 2015 - 2017)” dimana Komite Audit berpengaruh signifikan. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Anjani & Yadnya (2017) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015”, Komite Audit berpengaruh positif namun signifikan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang sebelumnya pernah diuraikan, maka hipotesis atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha1 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Return on Equity* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Kepemilikan Institusional terhadap *Return on Equity* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Ha3 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Return on Equity* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4. Ha4 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara Ukuran Komite Audit terhadap *Return on Equity* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI
5. Ha5 : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Komite Audit terhadap *Return on Equity* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

